

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di Indonesia dalam dewasa ini ditandai semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat maupun daerah disusun sedemikian rupa sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas Negara diantaranya adalah menyusun pelaporan keuangan yang andal. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang

dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (andal). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) terdiri dari : (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah tersebut, keterandalan merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait pengambilan keputusan berbagai pihak. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Menurut Muindro Renyowijoyo terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: **“(a) masyarakat, (b) para wakil rakyat, lembaga**

pengawas, lembaga pemeriksa, (c) pihak yang memberidonasi, investasi, pinjaman, dan (d) pemerintah”¹.

Fenomena pelaporan keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah dalam temuan BPK masih banyak disajikan data yang tidak sesuai bahkan keliru. Temuan pemeriksaan BPK dalam semester I tahun 2014 menyatakan bahwa dari 504 LKPD, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya 251 LKPD saja. Dari 251 LKPD yang telah mendapat opini BPK dengan WTP pada pemeriksaan tahun 2014 termasuk LKPD Kota Medan tetapi masih ditambah Dengan Pragraf Penjelasan (DPP). Hasil pemeriksaan BPK yang di laporkan dalam IHPS I tahun 2014, BPK mengungkapkan LKPD yang tidak mendapat opini WTP dikarenakan masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. BPK juga menilai akibat kurang cermatnya pemerintah memperhatikan pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Sumber: www.bpkri.go.id - IHPS I Tahun 2014).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah khusus LKPD Kota Medan masih belum memenuhi kriteria keterandalan. Mengingat keterandalan pelaporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan unsur informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan

¹ Muindro Renyowijoyo. **Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba**, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media: Jakarta, 2008, hal. 174

akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakrutan perhitungan, penyimpangan data dalam jumlah yang besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* tetapi pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Akan tetapi selain sumberdaya manusia dan teknologi informasi tersebut ada hal penting lain yang harus diperhatikan yaitu pengendalian intern akuntansi. Pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur tehnik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Fungsi pengendalian intern tersebut dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) di instansi pemerintah menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Kudus sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mirnayanti (2013) menemukan bahwa hanya pengendalian intern akuntansi yang berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh di Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat.

Hasil penelitian ini berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisatin (2015) pada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Eks Karesidenan Pati menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan khususnya di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Pemerintahan Kota Medan memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai laporan keuangan di instansi pemerintahan.

Berdasar uraian di atas, maka penelitian ini akan meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Medan khususnya di bagian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan dengan mengambil judul **“PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI**

INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan)''.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak:

Dalam penelitian, adanya masalah ditunjukkan oleh adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa adanya (apa yang sebenarnya), antara rencana dengan realisasi, antara *das sollen* dan *das sei*, antara *what ought to be* dengan *what is*.²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

² Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak. **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan kedua: Fakultas Ekonomi UHN, 2011, hal. 44.

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Serta menambah wawasan peneliti dalam bidang sektor publik.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.
3. Bagi Institusi Pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah, organisasi profesi, dan entitas pelapor). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah terdapat dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) menyatakan bahwa:

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : (a) akuntabilitas, (b) manajemen, (c) transparansi, (d) keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*), (e) evaluasi kinerja.³

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

³ **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** : Lampiran I Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun laporan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat

sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptorijanto dalam Zuliarti (2012), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Penilaian kinerja adalah penting untuk memvalidasi alat pemilihan, mengukur dampak dari program pelatihan, memutuskan kenaikan gaji dan promosi, dan menentukan kebutuhan akan pelatihan.

2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.4. Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

a. Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) sistem dan prosedur

akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi asset, dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c. Formulir, Dokumen, dan Catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan Tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

2.5. Keterandalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan: “...informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi”⁴. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 : Lampiran I Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

2.6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel:

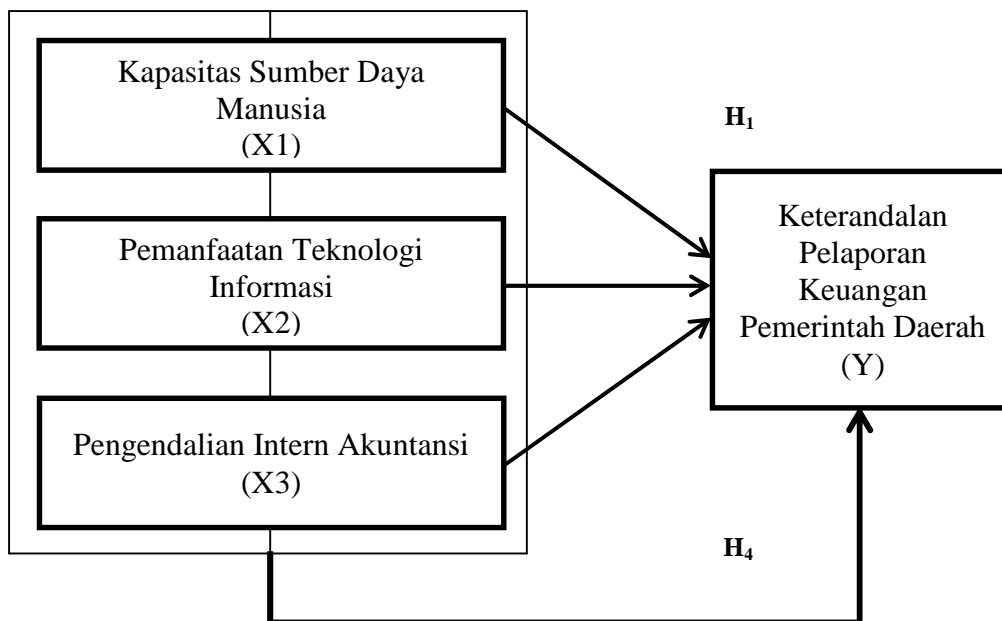
No	Nama Peneliti (Tahun - Penelitian)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zuliarti (2012)	Pengaruh SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah(studi pada pemkab. Kudus)	Variabel independen: Kapasitas SDM, PTI,dan pengendalian intern akuntansi. Variabel dependen:keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh.
2	Mirnayanti (2013)	Pengaruh kapasitas SDM pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemda Kab. Majene Sulbar.	Variabel independen: Kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi. Variabel dependen: Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh.
3	Anisatin Nihayah (2015)	Pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi	Variabel independen: Kapasitas SDM, pemanfaatan	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian

		informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Eks Karasidenan Pati	teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi. Variabel dependen: ketepatan waktu dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah	intern akuntansi secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	--	---

2.7. Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, uraian teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah di buat di atas, maka dapat di jelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi merupakan variabel yang berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di BPKD Kota Medan. Dengan kata lain kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi merupakan variabel independen (*independent variable*). Selanjutnya dapat di jelaskan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam hal ini merupakan variabel yang di pengaruhi oleh variabel lainnya sebagai variabel dependen (*dependent variable*).

2.7.2 Pengembangan Hipotesis

Jadongan Sijabat mengemukakan:

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara 2 variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. Dengan demikian, HIPOTESIS adalah jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris.⁵

Sejalan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, uraian teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual sebagaimana diuraikan dimuka, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

2.7.2.1 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

⁵ Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2014) hal. 47

Kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa berhubungan dengan keterandalan pelaporan keuangan. Sering sekali penempatan pegawai di beberapa daerah, Kota/ Kabupaten di Indonesia yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dan tugasnya sehingga menjadi kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang bernilai (andal). Kemudian kurangnya pelatihan-pelatihan yang di dukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang bernilai (andal). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Anisatin Nihayah (2015), bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Eks Karasidenan Pati.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H₁ : Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan.

2.7.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sangat berhubungan dengan keterandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi secara

optimal akan menghasilkan laporan keuangan yang bernilai (andal). Pemanfaatan teknologi informasi membantu para pegawai lebih cepat dalam proses pekerjaannya, aman dan lebih akurat. Oleh sebab itu, apabila pegawai tidak ahli atau terbatas dalam memanfaatkan teknologi informasi secara optimal memungkinkan akan menjadi kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang bernilai (andal). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012), bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan.

2.7.2.3 Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur tehnik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Fungsi pengendalian intern tersebut dapat membantu sumber daya manusia untuk

mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut. Muara dari hal itu akan menghasilkan laporan keuangan yang bernilai (andal). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Mirnayanti (2013), bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majene Sulawesi Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern akuntansi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H₃ : Pengendalian Intern Akuntansi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan.

2.7.2.4 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah maka dapat menciptakan informasi yang bernilai dan berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Berdasarkan semua dugaan hipotesis baik variabel dependen dan

variabel independen yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian *assosiatif kausal*. Menurut Sugiyono penelitian *asosiatif kausal* adalah: “...**penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan**

antara dua variabel atau lebih”.⁶Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Keterandalan merupakan variabel dependen.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak:

Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek yang menjadi unit penelitian, yang dapat terdiri dari manusia, benda, tumbuhan, hewan, peristiwa, gejala dan lain-lain yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan Sampel penelitian adalah sebagian anggota populasi yang menjadi sumber data dan diambil dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di bagian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan sebanyak 96 orang. Penyampelan atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Para pegawai yang bertanggungjawab dan berhubungan dalam melaksanakan fungsi akuntansi keuangan di BPKD Kota Medan.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Badan (KABAN), pegawai dibagian sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi pelaporan, sehingga tiap bidang tersebut ditetapkan dengan jumlah yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

⁶Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi**, Edisi Kedua belas : Alfabeta, Bandung, 2005. Hal. 11.

⁷Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Op. Cit**, Hal.44.

Jumlah Responden

No	BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah)	Jumlah Orang
1	Kepala Badan	1
2	Pegawai di Bagian Sekretariat	5
2	Pegawai di Bidang Anggaran	5
3	Pegawai di Bidang Perbendaharaan	10
4	Pegawai di Bidang Akuntansi Pelaporan	10
Jumlah		31

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala dinas dan pegawai di bagian sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi pelaporan merupakan pihak yang terlibat dengan bertanggungjawab dan mengerti dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah khusus di BPKD Kota Medan.

Jadi jumlah seluruh responden adalah 31 orang, karena 31 orang tersebut telah memenuhi kriteria tertentu. Kuesioner akan di beri kepada responden dan akan diterima kembali pada waktu yang disepakati.

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang akan menjadi pendukung untuk dianalisis dari variabel-variabel tersebut.

3.3.1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Konstruk Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator: (1) Latar belakang pendidikan, (2) Peran dan fungsi yang jelas, (3) pelatihan.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) adalah tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Terdapat tiga indikator yaitu: (1) Perangkat, (2) Pengelolaan, (3) Perawatan.
- c. Pengendalian intern akuntansi (X3), adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Terdapat empat indikator yaitu: (1) Sistem dan prosedur akuntansi, (2) Otorisasi, (3) Formulir, dokumen, dan catatan (4) Pemisahan tugas.

3.3.2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen (Y) yaitu keterandalan pelaporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP No. 71 Tahun 2010). Indikatornya yaitu: (1) penyajian jujur, (2) dapat diverifikasi, dan (3) netralitas.

3.4. Skala Pengukuran

Skala adalah perangkat ukur yang digunakan untuk mengetahui intensitas, arah atau tingkat dalam sebuah variabel yang berada pada tingkat pengukuran ordinal. Penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan-nya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan-nya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

3.5. Jenis dan Teknik pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawabannya.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik melalui program SPSS Versi 20.

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Uji Reabilitas

Menurut V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Reliabilitas merupakan:

Ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner.⁸

⁸V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, **Statistika Untuk Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama : Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. Hal. 186

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6.

3.6.2. Uji Validitas

Menurut Syofian Siregar, Validitas atau kesahihan adalah “...**menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur**”.⁹

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Menurut Arif Pratistio, pengambilan keputusan untuk pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r_{hitung} negatif atau $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.¹⁰

Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan asumsi klasik yang meliputi pengujian : (1) Normalitas, dan (2) Multikolinearitas.

3.6.3.1. Uji Normalitas

⁹Syofian Siregar, **Statistika Deskriptif Untuk Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama : Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 162

¹⁰Arif Pratistio, **Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Perancangan Percobaan dengan SPSS 12** : Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, Hal. 254.

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*). Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Pengujian secara visual dapat dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots*.

Menurut Sahid Roharjo,

Pedoman pengambilan keputusan dengan uji normalitas menggunakan rumus kolmogorov-smirnov adalah:

- a. **Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) $>0,05$**
- b. **Data berdistribusi tidak normal jika nilai sig (signifikansi) $<0,05$.**¹¹

3.6.3.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Arif Pratisto, Multikolinieritas adalah “**keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain**”.¹² Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini yang memiliki nilai korelasi di antara sesamanya sama dengan nol.

Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinieritas, yaitu mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independen A dan B saling berkorelasi dengan kuat, maka bias dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi. Kemudian dengan menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge.

¹¹Sahid Roharjo, **Uji Normalitas Rumus Kolmogorof-Smirnov SPSS**, 2015, <http://www.konsistensi.com/2013/07/uji-normalitas-rumus-kolmogorov-smirnov.html> [30 Mei 2016]

¹²Arif Pratisto, **Op. Cit**, Hal. 156.

Regresi yang bebas multikolinearitas ditandai dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) berkisar angka 1 dan Nilai *tolerance* berkisar angka 10 atau dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3.7. Analisis Deskriptif

3.7.1. Uji Regresi

Untuk menentukan hubungan yang berlaku antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Maka analisis statistik yang digunakan adalah persamaan Regresi Linear Berganda. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₃ = Pengendalian Intern Akuntansi

a = Konstanta

b₁ = Koefisien Regresi Kapasitas Sumber Daya Manusia

b₂ = Koefisien Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi

b₃ = Koefisien Regresi Pengendalian Intern Akuntansi

e = Tingkat Kesalahan Pengganggu (*Error*).

3.7.2. Pengujian Signifikan Parsial (Uji - t)

Pengujian statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan penggunaan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (= 5%) dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Penerimaan atau penolakan hipotesis dengan tingkat signifikansi dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Penerimaan dan penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak.

3.7.3. Pengujian Signifikan Simultan (Uji – F)

Uji ini dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel *ANOVA* $< 0,05$ atau 5% maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Sedangkan jika pengujian dilakukan dengan

membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka (H_0 ditolak) variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka (H_0 diterima) variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika probabilitas < 0.05 , maka H_a diterima.

Jika probabilitas > 0.05 , maka H_a ditolak.

3.7.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsiatu persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Selanjutnya, koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.